

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia yang belum dapat terselesaikan. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, yang menempati posisi ke-4, dengan jumlah penduduk mencapai 270 juta dan memiliki prosentase kemiskinan yang dapat dikatakan tinggi. Persentase penduduk miskin di Indonesia menurut data dari Badan Pusat Statistik pada September 2019 sebanyak 24, 2 juta dengan presentase 9,22%. BPS mengemukakan bahwa perbandingan kemiskinan lebih tinggi di daerah pedesaan dibandingkan di perkotaan. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 6,56% atau sekitar 9,86 juta, sedangkan persentase penduduk di daerah pedesaan jauh lebih tinggi yaitu sekitar 12,85% atau sekitar 14,93 juta.

Jumlah penduduk miskin yang masih tinggi dapat menghambat pembangunan nasional. Padahal tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, tercapainya kesejahteraan dan membangun kemandirian, termasuk pembangunan di pedesaan. Salah satu misi pemerintah dalam membangun daerah pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan juga keanekaragaman usaha di pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung roda ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Tujuannya, untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Pembangunan nasional harus diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat merupakan pelaku utama pembangunan dan berkewajiban untuk mengarahkan, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang.

Pemberdayaan masyarakat menurut Munawar Noor (dalam Jurnal Ilmiah *CIVIS*, 2011, hlm. 88) adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai yang ada di masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory*. Dalam rangka ini upaya agar memberdayakan masyarakat dapat dikaji menjadi tiga aspek yaitu: *Enabling* (menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat bisa berkembang), kedua *Empowering* (memperkuat potensi yang masyarakat miliki melalui langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang membuat masyarakat semakin berdaya) dan yang terakhir adalah *Protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.”

Selanjutnya Munawar Noor (2011, hlm. 89) mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah dengan segala keterbatasan yang belum mampu melepaskan diri dari derita kebodohan, keterbelakangan dan juga kemiskinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfokus pada penguatan individu saja, namun juga pranata sosial yang ada. Menanamkan nilai-nilai seperti bekerja keras, hemat, keterbukaan dan tanggung jawab yang menjadi bagian penting dalam pemberdayaan.

Mengentaskan kemiskinan di desa menjadi salah satu fokus penting bagi pemerintah agar pertumbuhan ekonomi Negara dapat meningkat. Dalam hal ini upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan dilakukan dengan upaya terbangunnya sumber-sumber penghasilan asli desa (PADes). Sumber penghasilan desa diantaranya berbentuk badan usaha, atau badan usaha milik desa (BUMDes). BUMDes, dapat dikatakan sebagai pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes

sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari, oleh, dan juga untuk desa.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dilaksanakan oleh Pemerintah melalui berbagai program, namun upaya itu belum banyak membuahkan hasil yang signifikan sebagaimana yang diharapkan. Terdapat banyak faktor yang paling dominan yang menjadi penyebab kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satunya ialah intervensi dari pemerintah yang sangat besar yang dapat menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan dengan efektif dan mengakibatkan adanya ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga menghambat semangat kemandirian (Buku Panduan BUMDes hlm. 2)

Melalui BUMDes, lembaga ekonomi yang pengelolaannya sepenuhnya oleh masyarakat, diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Lembaga ekonomi yang tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah, namun atas dasar keinginan masyarakat desa yang mengidentifikasi adanya potensi yang jika dikelola akan menimbulkan permintaan pasar. Maka kepemilikan lembaga BUMDes dikontrol bersama dimana tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan perekonomian tingkat masyarakat desa.

Pendirian BUMDes mempunyai maksud untuk mengurangi peran para tengkulak yang menyebabkan meningkatnya biaya transaksi antara harga produk dan produsen terhadap konsumen. Melalui lembaga ini diharapkan dapat membantu produsen di pedesaan agar selisih harga jual dengan biaya produksi menjadi layak dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal.

Pengoperasian BUMDes ditopang oleh lembaga moneter desa atau unit keuangan sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan juga ditopang oleh kebijakan yang memadai, maka akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di masyarakat pedesaan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis agar mengintegrasikan kebutuhan pasar, potensi dan penyusunan desain

Rahayu Astria Nurfajrin, 2022

IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) NIAGARA SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA WANGISAGARA KABUPATEN BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

lembaga kedalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokal serta dukungan kebijakan dari pemerintahan desa untuk meminimalisir rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa yang menyebabkan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan.

Menurut data terakhir tahun 2018 dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat bahwa Indonesia memiliki kurang lebih 41.000 BUMDes yang tersebar di 74.975 Desa di Indonesia. Ini menandakan bahwa 64% Desa di Indonesia telah memiliki BUMDes namun belum semuanya dapat berkembang, masih banyak BUMDes yang perlu mendapatkan pendampingan agar bisa menjadi penguat ekonomi dan menampung seluruh kegiatan ekonomi yang tumbuh di wilayah pedesaan. Tercatat sebanyak 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes yang telah beroperasi namun belum memberikan kontribusi yang signifikan pada pendapatan desa.

Di Kabupaten Bandung sendiri ada setidaknya 270 BUMDes yang artinya hampir semua desa yang ada di Kabupaten Bandung sudah memiliki BUMDes. Dari total keseluruhan yang ada, terdapat 85 BUMDes yang berkembang dan 184 masih pemula dan hanya ada 1 BUMDes yang telah maju dan mandiri yaitu BUMDes Niagara Desa Wangisagara Kec.Majalaya Kabupaten Bandung.

Desa Wangisagara sendiri telah memiliki BUMDes yang telah dibentuk pada 2003. Desa Wangisagara yang pada tahun 1999 masuk kedalam kategori Desa Tertinggal mendapat bantuan Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) dari pemerintah pusat sebesar 150 juta. Kemudian oleh tokoh desa setempat digunakan untuk membangun pasar. Hingga pada 2003 Pemerintah Desa Wangisagara membentuk BUMDes Niagara yang merupakan akronim dari berniaga di Desa Wangisagara. BUMDes Niagara mengelola pasar yang dibangun dari dana P3DT yang awalnya hanya beberapa puluh kios, setelah dikelola oleh BUMDes sekarang berkembang menjadi 200 kios. Selain pasar, usaha simpan pinjam menjadi unit usaha kedua yang dikelola oleh BUMDes Niagara yang konsumennya adalah para pedagang di pasar Desa Wangisagara. Kini nasabah BUMDes Niagara telah mencapai +-3.000 orang dan memiliki aset sebesar Rp.12

Rahayu Astria Nurfajrin, 2022

IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) NIAGARA SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA WANGISAGARA KABUPATEN BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

miliar. Selain kedua unit usaha itu, masih banyak unit-unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Niagara mulai dari air kemasan, produksi rumahan dan juga makanan khas.

Pengelolaan manajemen yang rapi dan unit usaha yang terus berkembang setiap tahunnya BUMDes Niagara bisa memberikan Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp.600 juta. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes Niagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung telah menunjukkan keberhasilan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, bahwa bahwa BUMDes Niagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung telah menunjukkan keberhasilannya. Kondisi tersebut berkaitan dengan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Pengelolaan BUMDes yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
2. Regulasi BUMDes yang disusun dengan didasarkan atas aspirasi masyarakat.
3. BUMDes Niagara disesuaikan dengan potensi masyarakat.
4. BUMDes di Desa Wangisagara dapat memberdayakan masyarakat.

Dalam kajian ini, dibatasi pada faktor pengelolaan dan dampak BUMDes Niagara terhadap masyarakat di Desa Wangisagara.

1.3 Rumusan Masalah

Didasarkan atas latar belakang dan hasil identifikasi masalah di atas, maka masalahnya dapat dirumuskan ke dalam “Bagaimana pengelolaan dan dampak dari BUMDes Niagara dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Wangisagara?”, dan untuk memudahkan dalam kajian ini, penulis mengajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Kegiatan BUMDes dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat Desa Wangisagara?.
2. Bagaimana upaya pengelolaan BUMDes Niagara dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat Desa Wangisagara??

Rahayu Astria Nurfajrin, 2022

IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) NIAGARA SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA WANGISAGARA KABUPATEN BANDUNG
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Bagaimana hasil BUMDes Niagara dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Desa Wangisagara?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan kegiatan BUMDes dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Wangisagara.
2. Untuk mendeskripsikan pengelolaan di BUMDes Niagara dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Wangisagara.
3. Untuk menganalisis hasil BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Wangisagara.
4. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan program BUMDes Niagara dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Wangisagara.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik teoritis maupun praktis sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah hasil kajian teoritik dalam memberdayakan potensi masyarakat desa melalui kegiatan ekonomi.
- 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi desa-desa lain dalam mengimplementasikan program Badan Usaha Milik Desa untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

- 2) Bagi pembaca, penelitian ini dapat menambah wawasan dalam penyelenggaraan program BUMDes untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

1.6 Struktur Organisasi skripsi

Sistematika pelaporan hasil penelitian ini disusun ke dalam struktur organisasi skripsi sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi cakupan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka yang berisikan tentang landasan teori yang menjadi dasar penelitian, lalu kerangka pikir dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan penelitian, yang didalamnya terdiri dari objek, lokasi dan subjek populasi/sampel penelitian serta penjelasan cara pemilihan sampel dan justifikasi pemilihan desain penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari dua hal yaitu mengenai pengolahan atau analisis data untuk menghasilkan temuan berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis, tujuan penelitian, lalu mengenai pembahasan atau analisis dari temuan yang didapat dari hasil lapangan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran yang merupakan penafsiran dan pemaknaan oleh peneliti terhadap hasil analisis yang ditemukan selama dilapangan.